



Bansos Harusnya Segera Dibagikan

YOGYA, TRIBUN - Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyayangkan lambannya pencairan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat. Baik itu berupa sembako, maupun solusi bagi pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM), Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), dan para pelaku usaha lainnya.

Anggota Komisi B DPRD DIY, Yuni Satia Rahayu terkejut adanya 10 toko di kawasan Jalan Maloboro dijual oleh pemiliknya. Dirinya menyadari bahwa ekonomi sekarang ini sedang sulit, dan terjadi krisis ekonomi akibat pandemi dan beberapa kebijakannya.

Terkait penanganan ekonomi, Yuni menjelaskan seharusnya persoalan krisis itu dapat segera pulih. "Namun Pak Presiden baru saja umumkan ada perpanjangan PPKM level 4 sampai 2 Agustus. Terkait bantuan itu betul, sekarang sudah harus segera diberikan," katanya, Minggu (25/7).

Mantan Wakil Bupati Sleman ini meminta supaya Pemda DIY segera mempersiapkan skema penanganan terhadap pelaku usaha mikro, kecil, hingga menengah. "Kami minta Pemda DIY segera susun skema pe-

laku usaha mikro, kecil menengah untuk terus berjulan daring," terang dia.

Ditanya apakah bantuan sosial oleh pemerintah sudah terlambat, karena baru akan disalurkan setelah masa PPKM darurat dan PPKM level 4 jilid pertama habis,

Yuni menilai bahwa pemerintah sangat lamban akan tanggung jawab tersebut. "Kami saja belum tahu sebetulnya pemda ini gimana, dan kapan menurukan bantuan sosialnya," tegas Yuni.

Ia berharap bantuan sosial yang dijanjikan oleh pemerintah segera diturunkan, karena

tiga minggu lamanya masyarakat diam di rumah, tidak bekerja dan tentu saja tidak ada pemasukan. "Kami harap bisa secepat mungkin diturunkan, ya. Karena tiga minggu kita dipaksa di rumah, tidak bekerja. Seharusnya bantuan bisa dikeluarkan," imbuhnya.

Mengenai arahan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) soal penggunaan Dana Kalsitimewaan (Danais) untuk penanganan Covid-19, menurut Yuni koordinasi yang ditempuh Pemda DIY dengan pemerintah pusat harus ringkas. "Karena harapan masyarakat DIY saat ini, ya, lewat Danais itu untuk alokasi bantuan," pungkasnya. (bda)



Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 09 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005